

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui pembangunan di sektor industri. Pembangunan di sektor industri bisa memberi dampak bagi masyarakat secara positif maupun negatif. Perkembangan suatu industri bisa memberi peluang pekerjaan serta dapat memberikan bantuan guna memberikan pengurangan pada pengangguran, yang bisa memberikan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun hasil dari pembangunan sektor industri bisa memberi dampak buruk untuk lingkungan sekitarnya berupa pencemaran lingkungan yang menimbulkan beragam masalah seperti karena limbah industri terjadi pencemaran air, banjir, adanya tanah longsor, juga mengakibatkan punahnya beragam spesies, mengurangi kesuburan tanah, menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan serta berlubangnya lapisan ozon (Sari et al., 2018).

Banyak pihak memberikan perhatian pada dampak lingkungan perusahaan seperti emisi gas rumah kaca, limbah, dan karbon (Akbas, 2016). Hal ini menunjukkan permasalahan sosial serta lingkungan hidup menimbulkan perhatian dari beragam pihak berupa pemerintah, sekaligus pemerhati lingkungan, lembaga masyarakat, pemegang saham, sekaligus kreditur. Selain itu ada beragam organisasi pemerhati lingkungan hidup dengan skala nasional maupun

internasional berupa : WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Greenpeace, dan IUCN (Internasional Union for Conservation of Nature). Selain itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatur tata kelola industri agar tidak mencemari lingkungan dan menyebabkan kerusakan lingkungan (Sari et al., 2018).

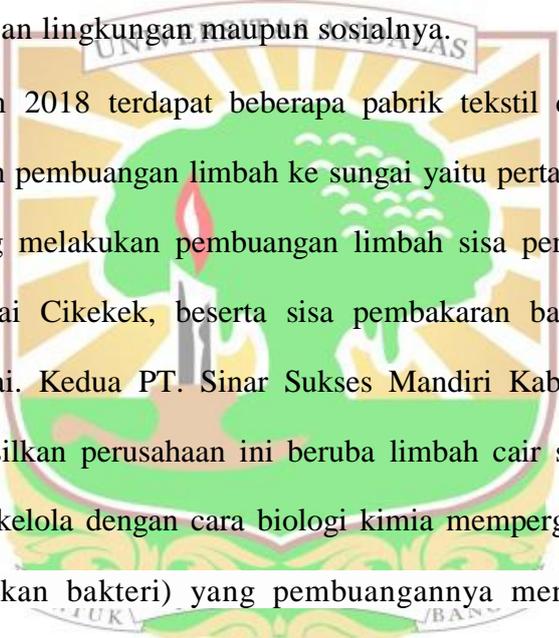
Rendahnya kepedulian tanggung jawab terhadap lingkungan bagi perusahaan publik di Indonesia menghadirkan beragam permasalahan mengenai lingkungan. Permasalahan lingkungan merupakan faktor yang perlu dipikirkan dengan penting dikarenakan pengelolaan lingkungan yang tidak baik akan menjadi penyebab terjadinya beragam bencana. Kondisi perubahan lingkungan hidup belakangan ini berupa perubahan iklim, terjadinya hujan asam, adanya penipisan lapisan ozon, adanya limbah bahan berbahaya serta beracun, kemudian degradasi keanekaragaman hayati telah jadi perhatian bagi dunia internasional sekaligus memberi keresahan pada masyarakat dunia. Hal ini penyebabnya adalah karena praktik industri yang mempergunakan teknologi serta bahan kimia berbahaya serta beracun, serta tidak bertanggung jawab dalam upaya maksimalisasi laba yang dilakukan oleh perusahaan (Kurniawan, 2019)

Untuk menghindari hal tersebut, maka seluruh kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan aspek lingkungan. *Environmental disclosure* (pengungkapan lingkungan) bisa dijadikan cerminan untuk keseriusan perusahaan guna melakukan penanganan permasalahan lingkungan, namun di Indonesia tidak banyak perusahaan yang melakukan pengungkapan jenis ini (Sari et al., 2018).

Teori legitimasi memaparkan bahwa entitas berupa perusahaan wajib taat pada kontrak serta norma sosial dalam melakukan operasinya. Ghazali (2020) memaparkan teori legitimasi memberi penegasan bahwa entitas atau organisasi, termasuk didalamnya perusahaan punya kewajiban agar terus melakukan usaha agar kegiatan perusahaannya sah operasionalnya sejalan batas, norma serta nilainya dalam masyarakat. Tumpuan dari teori ialah gagasan adanya “kontrak sosial”. Kontrak sosial punya makna bahwa setiap operasional perusahaan haruslah dapat memenuhi harapan masyarakat berupa perusahaan operasionalnya tidak hanya untuk keuntungan saja, melainkan tanggung jawab perusahaan harus dilaksanakan guna mengatasi beragam masalah seperti masalah sosial, sekaligus lingkungan, termasuk kesehatan dan keselamatan karyawan dalam bekerja. Perusahaan yang tidak mampu atau gagal dalam pemenuhan ekspektasi masyarakat tidak akan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Selain itu juga akan memperoleh hukuman yang diberikan masyarakat sebagai akibat gagal memenuhi harapan masyarakat, dengan hukumnya dapat berupa pembatasan hukum, memperoleh penyediaan sumber daya yang terbatas (modal keuangan dan tenaga kerja), selain itu juga memperoleh pemboikotan dari konsumen dengan cara terjadinya pengurangan pada permintaan produk yang dihasilkan perusahaan.

Pemerintah di Indonesia beserta regulator guna mengharuskan industri agar memiliki tanggung jawab pada lingkungan, sosial beserta tata kelola telah membuat beberapa peraturan untuk mengatur hal tersebut, agar legitimasi terpenuhi cocok dengan harapan stakeholder. Beberapa peraturan

tersebut adalah peraturan pemerintah nomor 47 pasal 4 ayat 1 tahun 2012 membahas mengenai Tanggung Jawab Sosial serta Area Perseroan terbatas. Selain itu juga ada peraturan otoritas jasa keuangan nomor 21 tahun 2015 mengenai pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Industri Terbuka. Namun peraturan beserta undang-undang yang diterbitkan pemerintah beserta regulator tidak mampu membuat perusahaan di Indonesia agar melaksanakan kegiatan industrinya dengan baik serta melakukan pemenuhan pertanggungjawaban lingkungan maupun sosialnya.



Pada tahun 2018 terdapat beberapa pabrik tekstil di Jawa Barat yang terbukti melakukan pembuangan limbah ke sungai yaitu pertama PT. Gede Indah Kota Cimahi yang melakukan pembuangan limbah sisa pencelupan kain yang dialirkan ke sungai Cikekek, beserta sisa pembakaran batu bara yang juga dialirkan ke sungai. Kedua PT. Sinar Sukses Mandiri Kabupaten Purwakarta, limbah yang dihasilkan perusahaan ini berupa limbah cair serta padat, dimana limbah tersebut dikelola dengan cara biologi kimia mempergunakan NAW (zat untuk menghidupkan bakteri) yang pembuangannya menggunakan saluran serta media selokan yang tujuan alirannya ke sungai Citarum. Selain itu air pembuangan kanjinya juga langsung dialirkan ke anak sungai Citarum tanpa proses IPAL. Pabrik tekstil ketiga adalah PT. Idola Selaras Abadi Majalaya Kabupaten Bandung perusahaan ini menghasilkan limbah dalam bentuk cair yang merupakan hasil proses Dying, Printing dan Finishing, limbahnya dibuang ke anak sungai Citarum Cikacembang dengan kondisi limbahnya yang melebihi baku mutu air limbah. Perusahaan terakhir PT. Surya Tekstil Kabupaten Karawang, perusahaan ini melakukan pembuangan air limbah dari

bak IPAL yang pelaksanaanya tidak sesuai SOP dimana cara yang dilakukan menggunakan selang yang langsung ditujukan ke bak APAL kemudian disedot menggunakan alat bantu dan dibuang langsung ke anak sungai Citarum (Siswoyo & Suparman, 2018).

Selanjutnya pada tahun 2019 terlihat dari informasi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Agustus 2019 menyampaikan sebanyak 47 dari total 114 perusahaan industri manufaktur di Jakarta mendapat teguran dari pemerintah daerah karena terbukti mencemari udara. Pabrik-pabrik tersebut harus melakukan pembenaha untuk kegiatan industrinya agar emisi gas buang indstri mereka tidak melampaui ambang batas mutu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 670 Tahun 2000 (Widadio, 2019).

Kemudian pada Agustus 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindak perusahaan-perusahaan penyebab polusi udara dengan menghentikan kegiatan perusahaan penyebab polusi udara yaitu PT Wahana Sumber Rezeki dan PT Unitama Makmur Persada yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasok batubara atau stockpile, dimana selama mereka menjalankan kegiatannya tidak mempunyai Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang rinci. Kemudian PT Maju Bersama Sejahtera yang juga juga bergerak di bidang pengolahan dan pemasok batubara atau stockpile melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan tidak sesuainya dokumen lingkungan dengan kondisi yang ada di lapangan pada kegiatan dumping limbah sisa pembakaran batubara atau FABA. Sementara PT Pindo Deli 3 yang merupakan produsen kertas berdasarkan keterangan Satgas KLHK menemukan untuk cerobong adanya kesalahan dalam lubang sampling

yang tidak memenuhi ketentuan teknis (Ekspresnews.com, 2023). Selain itu permasalahan ESG di Indonesia, terlihat dari pengungkapan *environmental, social dan governance* segala industri publik yang terdaftar di IDX, dimana hingga Oktober 2023 hanya 80 industri yang melaksanakan ESG disclosure.

Environmental disclosure bisa memberi bantuan pada perusahaan guna melakukan identifikasi resiko yang bermanfaat sebagai cara menilai kepatuhan sekaligus tahu cara untuk melakukan penghematan biaya yang dikeluarkan. Perusahaan yang menginformasikan mengenai lingkungan lebih banyak akan bisa membangun citra positif dimasyarakat sehingga akan berpartisipasi positif untuk kelangsungan hidup masyarakat serta lingkungan sekitarnya (Suprapti et al., 2019). Meski *environmental disclosure* sering dianggap sebagai pengungkapan sukarela, tapi faedah untuk perusahaan yang melaksanakannya sangat besar serta bisa jadi citra perusahaan yang baik di mata stakeholders.

Pengelola perusahaan harus memperhatikan mekanisme *good corporate governance* (tata kelola perusahaan). *Good corporate governance* menjadi penentu seberapa luas pengungkapan *environmental social governance* (Lagasio & Cucari, 2019). *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang punya tujuan utama melakukan pengelolaan risiko yang signifikan untuk melakukan pemenuhan tujuan bisnis perusahaan dengan cara pengamanan aset perusahaan untuk mendapatkan peningkatan nilai insvestasi pemegang saham untuk jangka panjang (Sudarmanto et al., 2021). *Good Corporate Governance* berhubungan dengan pengambilan keputusan yang efektif, dimana dalam menjalankannya dibangun dengan budaya

organisasi, nilai serta system, sekaligus beragam proses, maupun kebijakan serta struktur organisasi yang memiliki tujuan guna memperoleh pencapaian bisnis yang mendapatkan keuntungan, efisien serta efektif untuk melakukan pengelolaan risiko serta punya tanggung jawab dengan memberikan perhatian pada kepentingan stakeholders (Franita, 2018).

Penelitian terdahulu memaparkan hasil yang belum konkret tentang determinasi mekanisme tata kelola terhadap pengungkapan *environmental, social dan governance* maupun pengungkapan *environmental*. Selanjutnya dalam penelitian ini dipergunakan beberapa penerapan *good corporate governance* yang dilihat dari segi dewan direksi perempuan, ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, independensi komite audit, ukuran komite audit serta rapat komite audit.

Literatur secara umum menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara perempuan dalam dewan direksi dan tata kelola perusahaan yang efektif (Bear et al., 2010). Keberadaan wanita pada manajemen puncak dipercayai bisa memberikan pengendalian pada keadaan, dikarenakan wanita cenderung akan lebih independen, punya pemikiran luas serta fleksibel. Peran gender tradisional menyatakan perempuan tidak akan diwakilkan dalam dewan perusahaan dikarenakan ketika jarak kekuasaan semakin tinggi maka persyaratan tentang pemisahan gender pada dewan direksi akan semakin rendah (Humphries & Whelan, 2017). Birindelli et al., (2018) menemukan dewan direksi perempuan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *environmental, social dan governance*.

Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husted & Sousa-

Filho, (2019) menemukan dewan direksi perempuan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *environmental, social dan governance*. Begitu juga bertentangan dengan Septiana & Puspawati, (2022) menemukan dewan direksi perempuan negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *environmental, social dan governance*. Hal ini menunjukkan meski direktur wanita punya persentase yang tinggi belum bisa menjadi penentu mampu untuk memberikan pengaruh pada tingkat pengungkapan sosial yang memberi petunjuk bahwa wanita lebih sensitif terhadap isu-isu sosial. Pada budaya yang memiliki jarak kekuasaan tinggi, rekomendasi yang diberikan komposisi gender dewan direksi dianggap tidak penting, dikarenakan setiap orang tahu tempatnya dalam dewan direksi. Peran gender tradisional memberi petunjuk perempuan tidak akan terwakili dengan baik di dewan perusahaan. Ketika jarak kekuasaan semakin tinggi, maka dimungkinkan persyaratan terkait komposisi gender dewan direksi semakin kecil (Humphries & Whelan, 2017). Selain itu penelitian Adiasih & Lianawati (2019) juga menyatakan *woman on the board* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *environmental, social dan governance*.

Selanjutnya independensi dewan akan memberikan pengurangan pada konflik kepentingan antara stakeholder, hal ini akan memberikan dorongan untuk terjadinya transparansi yang lebih tinggi bagi perusahaan (Birindelli et al., 2018; Husted & Sousa-Filho, 2019). Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa independensi dewan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik *environmental, social dan governance* (Ismail et al., 2019). Direktur Independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *environmental, social dan governance* (Husted & Sousa-Filho, 2019). Terdapat hubungan positif antara

direktur independen dan pengungkapan sosial dan lingkungan (Liao et al., 2015). Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Birindelli et al., (2018) menemukan independensi dewan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *environmental, social dan governance*

Kemudian semakin besar ukuran dewan direksi, maka kinerja *environmental, social dan governance* perusahaan akan jadi semakin baik (Birindelli et al., 2018; Ismail et al., 2019) dikarenakan keahlian yang dimiliki direksi akan semakin beraneka ragam serta akan memberikan dorongan untuk pengambilan keputusan menjadi semakin baik penerapannya. Penelitian Husted & Sousa-Filho (2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *environmental, social dan governance*. Jimantoro et al., (2023) menemukan bahwa ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *environmental, social dan governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi merupakan hal esensial yang dapat mendukung keluasan pengungkapan *environmental, social dan governance*. Dewan direksi yang memiliki ukuran besar akan memberikan dorongan pada kesadaran perusahaan tentang berharganya untuk menerapkan aktivitas operasional yang memberikan perhatian pada pengungkapan *environmental, social dan governance*, sehingga akan memberikan dorongan untuk tingginya pengungkapan ESG (*environmental, social dan governance*). Pengungkapan informasi mengenai ESG diinginkan bisa memberikan pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan pemangku kepentingan perusahaan. Hal ini dikarenakan pemangku kepentingan memperoleh keyakinan bahwa perusahaan tidak hanya memberi perhatian pada kemampuan profitabilitas perusahaan, namun juga memperhatikan aspek ESG yang merupakan poin penting keberlanjutan

hidup perusahaan dimasa mendatang. Namun Pozzoli et al., (2022) menemukan ukuran Dewan positif tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *environmental, social dan governance*.

Rapat dewan dewan direksi memaparkan seberapa banyak aktivitas rapat yang dilaksanakan dewan direksi, dimana semakin banyak dewan direksi melaksanakan rapat, maka tingkat terjadinya efektifitas komunikasi maupun keterusterangan informasi akan mengalami peningkatan serta memberikan kemungkinan untuk terjadinya pengawasan yang lebih baik lagi (Jimantoro et al., 2023). Teori legitimasi memberikan dasar untuk mengusulkan hubungan positif antara frekuensi pertemuan dewan dan kinerja ESG (Birindelli et al., 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menemukan hubungan positif antara jumlah rapat dewan dan praktik keberlanjutan (Jizi, 2017; Hussain et al., 2018).

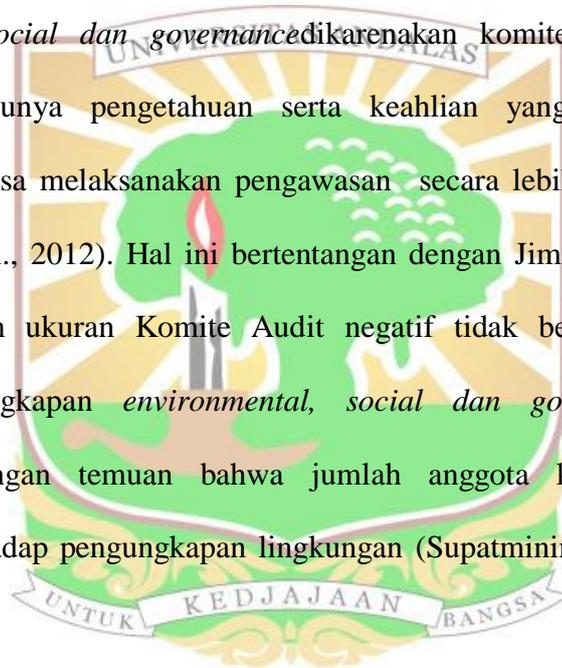
Jimantoro et al., (2023) menemukan jumlah Rapat Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *environmental, social dan governance*. Rapat menggambarkan proses koordinasi yang terjadi antar anggota dewan direksi. Jumlah rapat yang dilaksanakan secara tinggi menunjukkan bahwa tingkatan koordinasi dewan direksi untuk melakukan pemenuhan kewajiban akuntabilitas dalam bentuk laporan informasi mengenai *environmental, social dan governance* tinggi. Selanjutnya frekuensi rapat yang tinggi memberikan dorongan pada direksi untuk mengutarakan pengungkapan informasi *environmental, social dan governance* pada pemangku kepentingan sebagai salah satu wujud dari akuntabilitas perusahaan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Birindelli et al., (2018) menemukan Rapat dewan positif tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja ESG

Zgarni et al., (2016) menemukan bahwa independensi komite audit meningkatkan keterlibatan dalam memastikan keandalan keuangan yang dilaporkan. Raimo et al., (2020) memberikan bukti bahwa independensi komite audit memungkinkan peningkatan kualitas laporan terintegrasi. Al-Shaer & Zaman, (2018) menunjukkan bahwa independensi komite audit dikaitkan dengan penggunaan firma audit Big Four untuk jaminan keberlanjutan. Meskipun sebagian besar penelitian mengkonfirmasi hubungan positif antara independensi dewan dan kinerja keberlanjutan (Hussain et al., 2018). Mengenai peran spesifik kinerja dan pengendalian LST selama masa krisis, (Broadstock et al., 2021) menggarisbawahi hubungan positif antara independensi auditor dan kinerja ESG. Beberapa hasil penelitian juga menemukan Independensi komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ESG (Pozzoli et al., 2022). Kemudian independensi Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *environmental, social dan governance* (Buallay & Aldhaen, 2018). Hal ini bertentangan dengan temuan bahwa variabel proporsi anggota komite audit independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan (Supatminingsih & Wicaksono, 2016).

Dalam teori ketergantungan sumber daya berpendapat bahwa komite audit yang besar lebih bersemangat untuk mendedikasikan sumber daya dan wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Semakin banyak direktur di komite audit, semakin banyak keragaman, keahlian, dan kemampuan yang dapat menjamin pemantauan operasional (Buallay & Aldhaen, 2018). Oleh karena itu,

sebahagian besar anggota komite audit punya kecenderungan memberikan bantuan pada komite guna melakukan pengungkapan serta pemecahan masalah sekaligus dilema pada proses pelaporan yang dilaksanakan perusahaan (Li et al., 2012). Hal ini berarti ukuran adalah faktor integral untuk komite audit guna melakukan pengawasan pada praktik pengungkapan yang dilakukan perusahaan (Buallay & Aldhaen, 2018). Buallay & Aldhaen (2018) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *environmental, social dan governance* dikarenakan komite audit mempunyai anggota yang punya pengetahuan serta keahlian yang beraneka ragam, mengakibatkan bisa melaksanakan pengawasan secara lebih andal (Hamdan et al., 2013; Li et al., 2012). Hal ini bertentangan dengan Jimantoro et al., (2023) yang menemukan ukuran Komite Audit negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *environmental, social dan governance*. Hal ini bertentangan dengan temuan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan (Supatminingsih & Wicaksono, 2016).



Frekuensi pertemuan sebagai evaluasi uji tuntas komite audit. Frekuensi rapat merupakan elemen inti dalam keandalan dan efisiensi aktivitas dan proses perusahaan, meskipun hanya sedikit penelitian yang mengakui hubungan antara kinerja perusahaan dan jumlah rapat. Frekuensi pertemuan merupakan karakteristik penting dari komite audit. Anggota dewan yang mengadakan pertemuan secara rutin akan lebih mungkin menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab mereka dengan penuh perhatian dan berhasil. Dewan yang

menyeluruh akan lebih efektif meningkatkan tingkat pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pilihan auditor eksternal dan komite audit (Buallay & Aldhaen, 2018). Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan (Zahri, 2020). Jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kuantitas dan kualitas pengungkapan *environmental, social dan governance* (Buallay & Aldhaen, 2018). Hal ini bertentangan dengan Jimantoro et al., (2023) yang menemukan jumlah Rapat Komite Audit positif tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *environmental, social dan governance* serta temuan Supatminingsih & Wicaksono, (2016) yang menyatakan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan

Dari pemaparan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa masih ada perbedaan hasil penelitian dari berbagai peneliti sebelumnya. Perbedaan hasil penelitian berkemungkinan dikarenakan perbedaan sampel yang digunakan dalam penelitian serta faktor lainnya yang tidak termasuk model penelitian yang bisa mempengaruhi pengungkapan *environmental, social dan governance*. Hal tersebut jadi yang memberikan dorongan pada peneliti guna melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh good corporate governance terhadap pengungkapan *environmental, social dan governance* dengan menambahkan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas serta umur perusahaan. Variabel Kontrol merupakan variabel yang dapat dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar.

Berdasar pemaparan latar belakang dan fenomena tersebut maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Environmental* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2018 - 2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang maka dapat dikemukakan perumusan permasalahan seperti yang diuraikan berikut :

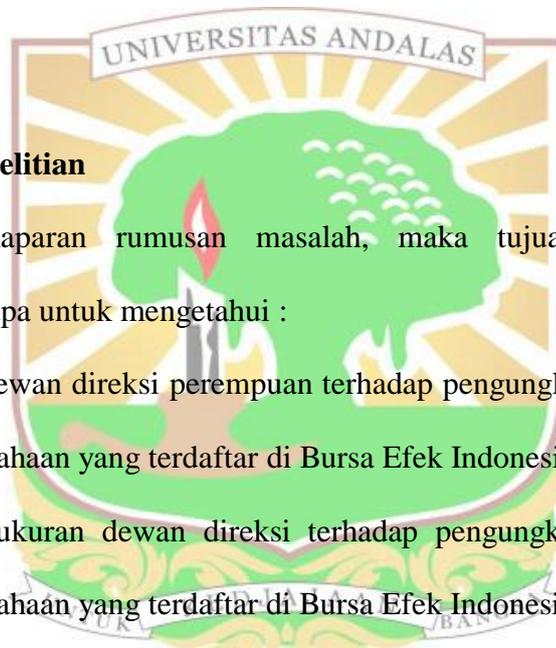
1. Bagaimana pengaruh dewan direksi perempuan terhadap pengungkapan *environmental* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *environmental* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
3. Bagaimana pengaruh rapat dewan direksi terhadap pengungkapan *environmental* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
4. Bagaimana pengaruh independensi komite audit terhadap pengungkapan *environmental* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

5. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan *environmental* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
6. Bagaimana pengaruh rapat komite audit terhadap pengungkapan *environmental* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dikemukakan berupa untuk mengetahui :

1. Pengaruh dewan direksi perempuan terhadap pengungkapan *environmental* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *environmental* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Pengaruh rapat dewan direksi terhadap pengungkapan *environmental* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Pengaruh independensi komite audit terhadap pengungkapan *environmental* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan *environmental* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).



6. Pengaruh rapat komite audit terhadap pengungkapan *environmental* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitiannya diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan *environmental* pada para pembaca secara *internal* maupun *eksternal*.

2. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dari hasil penelitian yang diperoleh bisa memberikan manfaat berupa bertambahnya pemahaman pada bidang keuangan yang berhubungan dengan *good corporate governance* dan pengungkapan *environmental*

- 2) Diharapkan dari hasil penelitian bisa memberi informasi, masukan serta acuan untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mengevaluasi *good corporate governance* dan pengungkapan *environmental* hingga bisa menjaga kualitas dan memberikan peningkatan pada nilai perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang akan dilaksanakan.

- 3) Bagi stakeholder bisa jadi bahan pertimbangan untuk tindakan pengambilan keputusan investasi yang berhubungan dengan isu keberlanjutan yang punya dampak pada kinerja keuangan perusahaan untuk jangka panjang.
- 4) Bagi pemerintah bisa jadi bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan isu keberlanjutan perusahaan.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan *environmental* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 sampai dengan 2022.
2. Data yang dipergunakan pada penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 sampai dengan 2022 yang melakukan pengungkapan *environmental*.
3. Variabel independen dalam penelitian ini *good corporate governance*, variabel dependennya pengungkapan *environmental* dan variabel kontrolnya ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas serta umur perusahaan.
4. Pengolahan ditanya mempergunakan analisis regresi linier berganda yang diperuntukan guna mengetahui nilai signifikan dari pengaruh antar variabel yang dipergunakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan sistematikanya dijelaskan pada beberapa bab yang diuraikan berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori berupa teori legitimasi, teori Stakeholder, pengungkapan *environmental* , *good corporate governance*, serta ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas serta umur perusahaan juga membahas penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang membahas analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang simpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian serta saran dari hasil penelitian.